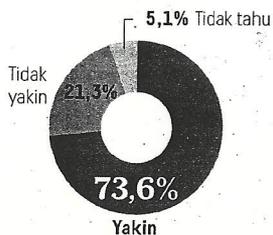


Melawan Lupa Reformasi

Gerakan reformasi menjadi catatan sejarah Indonesia yang tak mudah terhapuskan. Agenda reformasi hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah. Cita-cita reformasi perlu dijaga dan ditransformasi dari generasi ke generasi.

Yakinkah Anda tujuan gerakan reformasi 1998 di Indonesia akan tercapai?



Perlu kah generasi muda memahami sejarah peristiwa gerakan reformasi 1998?



Kepemimpinan Presiden Indonesia Pascareformasi

BJ Habibie

Latar belakang: Sipil
Periode kepresidenan:
21 Mei 1998-20 Oktober 1999

Jejak sejumlah peristiwa:

- Melahirkan paket UU Politik (UU No. 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilu, UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD)
- Menggelar Pemilu 1999 (7/6/1999)
- Pencabutan SIUPP, membuka kebebasan pers
- Polri lepas dari ABRI (1/4/1999)
- Menggelar referendum Timor Timur (30/8/1999)
- Amendemen I UUD 1945 (19/10/1999)
- MPR menolak pertanggungjawaban Habibie, ia pun mundur dari pencalonan presiden (20 Oktober 1999)

Abdurrahman Wahid

Latar belakang: Sipil
Periode kepresidenan:
20 Oktober 1999-23 Juli 2001

Jejak sejumlah peristiwa:

- Menetapkan Khonghucu sebagai agama yang diakui negara
- Amendemen II UUD 1945 (16/8/2000)
- DPR mengeluarkan Memorandum I (1/2/2001) dan Memorandum II (30/4/2001) untuk Gus Dur
- Mengeluarkan dekrit pembubaran DPR dan Golkar (23/7/2001)
- MPR memberhentikan Gus Dur (23/7/2001)

Megawati Soekarnoputri

Latar belakang: Sipil
Periode kepresidenan:
23 Juli 2001-20 Oktober 2004

Jejak sejumlah peristiwa:

- Amendemen III UUD 1945 (10/11/2001)
- Amendemen IV UUD 1945 (10/8/2002)
- Penghapusan Fraksi TNI/Polri di parlemen
- UU No 30/2002 tentang KPK disahkan (27/12/2002).
- UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan (13/8/2003).
- Pilpres langsung untuk pertama kali (2004)

Susilo Bambang Yudhoyono

Latar belakang: Militer
Periode kepresidenan:
2004-2019, dan 2009-2014

Jejak sejumlah peristiwa:

- Perdamai di Aceh (15/8/2005)
- Bantuan langsung tunai dikurirkan (1/10/2005)
- Pemilihan kepala daerah digelar secara langsung.
- Presiden pertama di era reformasi yang menjabat dua periode.

Joko Widodo

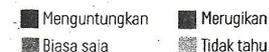
Latar belakang: Sipil
Periode kepresidenan:
2014-2019

Jejak sejumlah peristiwa:

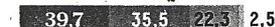
- Penguatan pembangunan daerah tertinggal dan terluar
- Tahapan pertama pilkada serentak nasional dimulai: Gelombang I (9/12/2015), Gelombang II (15/2/2017), Gelombang III (27/6/2018)
- Mengeluarkan 15 Paket Kebijakan Ekonomi
- Program Tax Amnesty (1/7/2016)



Menurut Anda, menguntungkan atau merugikan gerakan reformasi 1998 bagi perjalanan Indonesia ke depan? (Persen)



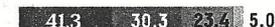
Mengalami sendiri



Mendapat cerita dari orang lain



Mendapat informasi dari buku/literatur



N= 560

Metode Jajak Pendapat: Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 7-8 Mei 2018. Sebanyak 560 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 16 kota besar di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan ± 4,1 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jejak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesuai karakteristik responden di 16 kota besar.



Rangkuman hasil jajak pendapat harian *Kompas*, pekan lalu, menunjukkan, gerakan reformasi masih tersimpan dalam ingatan kolektif publik. Sebanyak 80,5 persen responden mengaku tahu peristiwa aksi dan gerakan reformasi yang bergulir pada 1998 tersebut. Pengetahuan mereka tak hanya didapat dengan mengalami sendiri peristiwa tersebut, tetapi juga dari cerita kolega dan berbagai sumber literasi. Buku dan sumber bacaan lainnya memberikan gambaran bagaimana peristiwa gerakan reformasi dipahaminya oleh generasi yang tak mengalami langsung situasi 1998.

Menariknya, responden yang tahu langsung peristiwa dua deka-de silam dan responden yang mengetahui dari bacaan cenderung memaknai reformasi sebagai sesuatu yang positif dan menguntungkan bagi perjalanan Indonesia ke depan. Sebaliknya, responden yang mendapatkan informasi dari cerita mulut ke mulut tentang reformasi lebih memaknai peristiwa itu sebagai hal yang merugikan masa depan bangsa.

Beda sikap ini tentu tak lepas dari perbedaan sumber informasi yang diperoleh. Cerita soal reformasi hari ini, boleh jadi, masih tentang harapan-harapan yang belum terealisasikan. Jika berangkat dari enam agenda tuntutan reformasi, yakni supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; pengadilan terhadap presiden ke-2 RI Soeharto; amandemen konstitusi; pencabutan dwifungsi ABRI; dan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, harus diakui ada tuntutan yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi.

Dua hal yang banyak disebutkan oleh responden ketika ditanya tentang reformasi yaitu identik dengan turunnya Soeharto dari kekuasaan dan kasus kerusuhan Mei 1998. Meski de-

mikian, dua ingatan soal reformasi ini tak menutupi apresiasi publik pada gerakan mahasiswa. Aksi mahasiswa jadi hal ketiga yang menempati ingatan kolektif publik tentang gerakan reformasi.

Lima rezim

Lalu, apakah tuntutan reformasi sudah terjawab saat ini? Tentu ada banyak faktor untuk bisa menjawab tersebut. Namun, jika mengikuti lima rezim pemerintahan pascareformasi, setidaknya bisa diinventarisasi sejauh mana tuntutan reformasi terpenuhi. Di era pemerintahan BJ Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), misalnya, sebagian besar energi terkuras untuk membuka pintu-pintu demokrasi yang selama 32 tahun lebih "ditutup" rezim Orde Baru. Di era ini, paket undang-undang politik direvisi, seperti UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3/1999 tentang Pemilu, serta UU No 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Perubahan undang-undang berimbas pada perubahan sistem kepartaian di Indonesia yang kembali mengarah ke multipartai setelah sepanjang pemerintahan Orba "dipaksa" memilih tiga partai politik hasil fusi. Tak heran kemudian Pemilu 1999 yang disiapkan lebih kurang hanya satu tahun diikuti 48 partai politik. Banyak pihak menyebut pemilu ini paling demokratis setelah Pemilu 1955. Selain itu, di rezim pemerintahan Habibie pula pintu demokrasi dibuka untuk insans pers, salah satunya dengan penghapusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Kebijakan ini menjadi simbol kebebasan pers, kekuatan keempat demokrasi. Terlepas kekurangan dari pemerintahan ini, termasuk soal lepasnya Timor Timur dari Indonesia setelah referendum dilakukan, pemerintahan Habibie

sukses membuka pintu keran demokrasi pasca-gerakan reformasi. Namun, penolakan MPR terhadap pertanggungjawaban Habibie membuatnya mengundurkan diri dari bursa pencalonan presiden 1999.

Di periode pemerintahan selanjutnya, transisi penguatan demokrasi dan ekonomi jadi tantangan. Ini terjadi di era Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004). Gus Dur lebih menguatkan iklim demokrasi yang baru terbuka dengan penguatan pluralisme. Sejumlah kebijakannya, seperti menetapkan Khonghucu sebagai agama resmi yang diakui negara, kemudian penetapan Imlek sebagai hari libur nasional, adalah potret komitmen pemerintahan Gus Dur terhadap pluralitas dan kebinekaan. Namun, Gus Dur gagal menyelesaikan pemerintahannya karena MPR memberhentikan-nya setelah Gus Dur mengeluarkan dekret yang salah satunya berisi pembekuan MPR/DPR.

Sementara itu, Megawati yang menggantikan Gus Dur pun tak mudah melanjutkan estafet pemerintahan. Kondisi perekonomian jadi tantangan di periode Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004). Meski demikian, di era inilah demokrasi elektoral menemukan momentumnya. Salah satu hasil amendemen keempat UUD 1945 adalah mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Di era ini juga lahir Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanah undang-undang dalam memberantasan korupsi.

Pemilihan presiden langsung semakin menguatkan fenomena demokrasi elektoral, terutama

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

20 Tahun Reformasi

praktik pemilihan langsung kepala daerah. Hal ini mulai terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Demokrasi elektoral pun menguat di daerah. Fenomena menguatnya demokrasi elektoral terjadi sampai periode pemerintahan Joko Widodo.

Keentingan politik

Tentu demokrasi elektoral tak bisa dilepaskan dengan menguatnya kepentingan politik elite yang cenderung mendominasi pergulatan politik nasional. Hasil jajak pendapat merekam, kepentingan politik ini dinilai sebagai penghambat paling besar dari tujuan reformasi. Demokrasi elektoral yang melahirkan maraknya transaksi politik, baik antarelite maupun yang melibatkan rakyat dengan politik uang, diakui atau tidak, melahirkan pragmatisme politik. Keentingan politik yang tak di-

kelola dengan cara-cara beradab dan beretika melahirkan praktik politik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Kondisi ini diiringi dengan praktik korupsi yang kini jadi musuh bersama bangsa. Tidak heran jika korupsi pun dinilai menjadi penghambat besar tercapainya agenda reformasi. Lalu bagaimana, apakah agenda reformasi tetap bisa tercapai jika kepentingan politik yang menguasai elite dan praktik korupsi masih menggurita? Tentu perjalanan lima rezim pemerintahan pascareformasi dengan dinamika politiknya harus diakui melahirkan benang merah yang mengarah pada pemenuhan tuntutan

reformasi. Apalagi publik yang diwakili 73,6 persen responden meyakini, cita-cita reformasi akan tercapai.

Tentu saja hal ini tak boleh berhenti pada sebatas keyakinan. Rakyat harus setia mengawalinya. Salah satu caranya, mentransformasikan cita-cita reformasi ke generasi berikutnya. Apalagi mayoritas responden menyatakan, generasi muda perlu memahami gerakan reformasi 1998. Hal ini penting sebagai bagian dari upaya melawan lupa.

(YOHAN WAHYU/
LITBANG KOMPAS)

klik.kompas.id/reflekrefor

TOYOTA | LET'S GO BEYOND

satu Indonesia

MUDIK SEMAKIN SERU BERSAMA AUTO2000

Seru